JATI DIRI

Pilah-pilih Beri Bantuan

KESULITAN ekonomi yang dialami pelawak Nunung membuat trenyuh. Harta bendanya sudah habis dijual untuk biaya berobat. Dia pun memilih *ngekos*. Padahal, saat jaya-jayanya, dia menghidupi 50 saudaranya. Yang bikin miris, ternyata 50 saudara itu sama sekali tak membantu Nunung saat kondisinya terpuruk seperti sekarang.

Di medsos *X*, ada pula seseorang yang memiliki kebiasaan memberikan sedekah yang berbuah petaka. Rumahnya kerap didatangi banyak orang yang meminta sedekah. Jika tidak diberi, mereka malah marah-marah. Bahkan, mereka sampai melempari rumah sang dermawan dengan petasan. Hal itu membuatnya tak nyaman sehingga akhirnya memilih pindah rumah. Dan, berhenti memberikan sedekah.

Pelajaran yang bisa diambil adalah batasan memberikan bantuan. Boleh-boleh saja membantu. Namun, jangan berlebihan. Apalagi sampai menyengsarakan diri sendiri meski bantuan itu untuk anggota keluarga terdekat.

ILUSTRASI: DEDHIE RIHADI/AI/JAWA POS

Sebab, satu kali mendapat bantuan, orang akan berterima kasih. Dua kali dibantu, orang tersebut akan merasa biasa. Dapat bantuan untuk kali ketiga, orang akan jadi berharap. Pada aksi keempat, orang tersebut merasa sudah seharusnya mendapatkan bantuan. Nah, saat tak diberi bantuan lagi, orang tersebut akan marah-marah.

Saya yakin, kejadian itu *relate* dengan keseharian kita. Banyak yang mengalami hal serupa. Tidak dikasih, dikatakan pelit. Saat sudah dikasih, tidak berterima kasih. Justru kita yang emosional. Kalau sudah begitu, pahala pun bisa jadi tak didapat. Nah, tentu kita sendiri yang merugi.

Lalu, apakah tidak boleh bersedekah? Tentu saja tidak ada yang melarang. Apalagi pada momen Ramadan seperti saat ini. Pahala kebaikan akan dilipatgandakan. Hanya, lebih baik memberikan bantuan tidak dalam bentuk uang. Untuk kasus dan orang tertentu, mereka bisa dilatih keterampilan. Dengan begitu, orang yang dibantu tersebut tidak *ngemis* terus.

Alternatif lain adalah bersedekah ke lembaga zakat tepercaya. Atau ke masjid yang memang memiliki program untuk pemberdayaan warga miskin. Dengan begitu, uang yang kita sedekahkan jauh lebih berguna. Yang paling penting, kita pun jadi ikhlas untuk memberikan bantuan. **(*)**

RUU TNI dan Kembalinya Bayang-Bayang Militerisme

Oleh **ANIELLO IANNONE**

Dosen departemen politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro

DALAM beberapa hari terakhir, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dikenal sebagai RUU TNI, memicu perdebatan sengit di kalangan politik dan akademik. Amandemen itu, yang diajukan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, bertujuan memungkinkan personel militer aktif menduduki jabatan sipil strategis di berbagai sektor. Termasuk pertahanan, intelijen, operasi pemberantasan narkotika, serta misi pencarian dan penyelamatan.

Meski RUU itu umumnya mensyaratkan bahwa sebagian besar personel militer harus pensiun sebelum memasuki sektor sipil, pengecualian untuk beberapa posisi kunci menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan tata kelola demokratis di Indonesia.

Salah satu aspek utama dalam perdebatan ini adalah risiko praetorianisme. Yaitu, kecenderungan militer untuk berperan dominan dalam struktur kekuasaan sipil, melampaui fungsi pertahanan nasional. Konsep itu merujuk pada sejarah Garda Praetorian di Kekaisaran Romawi dan kini digunakan untuk menggambarkan ancaman terhadap demokrasi akibat keterlibatan militer yang berlebihan dalam pemerintahan.

RUU TNI diajukan sebagai reformasi administratif untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat keamanan nasional. Namun, amandemen tersebut berpotensi melemahkan pemisahan institusional antara ranah militer dan sipil yang telah dibangun sejak era pasca-Soeharto. Pada masa rezim otoriter Soeharto, doktrin dwifungsi militer memberikan legitimasi bagi TNI untuk berperan luas dalam pemerintahan. Namun, Reformasi 1998 bertujuan untuk mengurangi pengaruh militer secara bertahap dan memperkuat kontrol sipil serta partisipasi politik. Revisi itu dapat ditafsirkan sebagai langkah mundur dalam proses demiliterisasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Ambiguitas Hukum

Analisis kritis terhadap RUU itu perlu mempertimbangkan berbagai tantangan institusional yang dapat muncul akibat diperbolehkannya perwira aktif menduduki jabatan sipil strategis. Pertama, terdapat potensi tumpang-tindih kewenangan yang bisa menciptakan ambiguitas hukum dalam penerapan regulasi.

Dalam kasus pelanggaran atau korupsi, tidak jelas apakah seorang perwira militer yang menjabat di posisi sipil harus diadili di pengadilan sipil atau militer. Ketidakjelasan tersebut dapat membuka ruang bagi impunitas dan melemahkan mekanisme akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Kekhawatiran lain adalah kemungkinan berkembangnya struktur *dual government* di mana institusi formal dan proses elektoral tetap ada, tetapi keputusan strategis berada di tangan elite militer dan sekutu politiknya yang beroperasi secara tertutup. Pola tersebut berpotensi merusak keseimbangan demokrasi yang dibangun sejak era reformasi.

Pemisahan otoritas sipil dan militer merupakan pilar fundamental bagi stabilitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Reformasi pasca-1998 dirancang untuk memastikan bahwa administrasi publik dijalankan oleh pejabat terpilih dan birokrat profesional sehingga militer tidak secara langsung mengintervensi pengambilan keputusan politik. RUU TNI berisiko mengikis prinsip itu. Membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan yang dapat menghambat partisipasi politik.

Secara struktural, institusi militer beroperasi dengan hierarki yang kaku. Jika pola tersebut diterapkan dalam birokrasi sipil tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, sistem pemerintahan yang partisipatif dapat berubah menjadi lebih eksklusif dan otoriter.

> Pemisahan otoritas sipil dan militer merupakan pilar fundamental bagi stabilitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.”

Pengawasan Sipil

Karena itu, proses revisi legislatif tersebut harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Parlemen, bersama masyarakat sipil dan media independen, harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam undang-undang tetap menjunjung tinggi prinsip subordinasi militer terhadap kekuasaan sipil. Personel militer yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada standar transparansi dan akuntabilitas yang sama dengan pejabat terpilih.

Selain itu, lembaga peradilan yang independen harus memiliki kewenangan untuk memperjelas batas yurisdiksi dalam menangani konflik atau penyalahgunaan wewenang guna memastikan akuntabilitas yang jelas.

Ancaman praetorianisme bukan hanya persoalan legislatif, melainkan juga tantangan eksistensial bagi demokrasi Indonesia. Konsentrasi kekuasaan di tangan elite militer dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan melemahkan partisipasi politik –dua elemen kunci dalam proses konsolidasi demokrasi.

Penguatan pengawasan sipil menjadi keharusan untuk mencegah infiltrasi militer yang dapat mengubah sistem demokrasi menjadi simbol belaka. Risiko kembalinya praktik otoriter yang mengaburkan batas antara pemerintahan sipil dan militer adalah ancaman nyata.

Tantangan utama Indonesia saat ini adalah menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan efisiensi dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan mereka yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada publik. Mempertahankan kendali sipil yang kuat atas angkatan bersenjata adalah kunci bagi masa depan demokrasi Indonesia. (*)

ILUSTRASI: AGUNG KURNIAWAN/AI/JAWA POS

MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal **650** kata. Kirim ke: **opini_jp@jawapos.co.id.** Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim. **(*)**

PEMBACA MENULIS

Terjerat Tiket Mahal oleh Calo di Terminal

ILUSTRASI: AGUNG KURNIAWAN/AI/JAWA POS

SAYA setiap hari berangkat kerja dari Jombang ke Surabaya naik bus antarkota dalam provinsi pergi pulang (PP). Beberapa hari lalu, saat naik bus dari pulang kerja tengah malam, beberapa penumpang yang dioper dari bus lain naik di tengah perjalanan.

Dua di antara mereka adalah seorang ibu parobaya bersama anaknya yang masih kecil. Dari percakapan dengan penumpang lain, si ibu bercerita awalnya dirinya naik dari Terminal Purabaya (Bungurasih). Dia hendak menuju Jawa Barat.

Oleh calo di Terminal Purabaya, dia diarahkan menumpang bus jurusan Jogja lebih dahulu, baru nanti disambung dengan bus lain. Yang memprihatinkan, si ibu itu ditarik Rp 400 ribu per orang untuk turun di Jogja (bersama anak berarti Rp 800 ribu). Padahal, ongkos bus ekonomi Surabaya–Jogja hanya Rp 120 ribu–Rp 150 ribu.

Mohon kepada pengelola Terminal Purabaya untuk membersihkan para calo tiket dari area terminal. Apalagi saat ini memasuki arus mudik Lebaran. Kasihan para pemudik, terutama perantau, yang menjadi korban mereka.

IIS N.,
Diwek,
Jombang,
08123357xxx

Jawa Pos

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Eko Priyono
Wakil Pemimpin Redaksi: Andrianto Wahyudiono

Kepala Kompartemen:
Agung Kurniawan, Baskoro Yudho, Juneka Subaihul Mufid

Redaktur Senior: Ibnu Yunianto, Tatang Mahardika

Redaktur: M. Ali Mahrus, Andri Teguh Pryantoro, Aris Imam Masyhudi, Ariski Prasetyo Hadi, Dani Nur Subagiyo, Firzan Syahroni, Nora Sampurna, Nur Aini Roosilawati

Asisten Redaktur: Achmad Santoso, Firma Zuhdi Alfauzi, Galih Adi Prasetyo, Glandy Burnama, Koko Kurniawan, Lugas Wicaksono, Nugroho Galih Wicaksono

Reporter: Agas Putra Hartanto, Agfi Sagittian, Ahmad Reza, Bagus Putra Pamungkas, Dinda Juwita, Dian Wahyu Pratama, Eko Hendri Saiful, Farid Satya Maulana, Ferlynda Putri Sofyandari, Folly Akbar, Hasti Edi Sudrajat, Ilham Dwi Ridlo Wancoko, Lailatul Fitriani, Ludri Argo Wisnu, M. Azami Ramadhan, M. Hilmi Setiawan, M. Salsabil A'dn, Mariyama Dina, Narendra Prasetya, Ramadhoni Cahya, Retno Dyah Agustina, Rizky Ahmad Fauzi, Septian Nur Hadi, Shafa Nadia, Sholeh Hilmi Qosim, Sugih Mulyono, Wahyu Zanuar Bustomi, Zalzilatul Hikmia.

Fotografer: Alfian Rizal (koordinator), Angger Bondan, Hanung Hambara, Puguh Sujiatmiko, Salman Toyibi, Riana Setiawan

Desain Grafis dan Tata Artistik:
Budiono, Herlambang Bintang, Imas Ayu, Isnina Aryani Hasanah

Sekretaris Redaksi: Dava Novianti
Pracetak: M. Tova Maulana Irfan

Tim Liputan Iklan
Kepala Kompartemen: Mahesa Indra Wardhana
Asisten Redaktur: Agus Wirawan, Xaveria Rahmani Utami
Reporter: Ari Setiyaningrum, Al Mushowwir
Iklan: David Arya, Retno Palupi, Andreswari, Idah Saidah, Leanda Masius, Ratih Koriah, Rizna Mifta, Vicky Ferandhika, Mochammad Sholeh

Sirkulasi: Moh. Mansur

Penerbit: PT Jawa Pos Koran
Direktur Utama: Leak Kustiyo
Wakil Direktur Bidang HRD: Rudy Harahap
Wakil Direktur Bidang Keuangan: Desy Andriani
Wakil Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi

Konsultan Hukum:
Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm)
Ombudsman: Bambang Janu Isnoto

Alamat Redaksi:
Graha Pena Lt 4 Jl A. Yani 88, Surabaya, 60234

Jawa Pos Metropolitan
General Manager: Suprianto
Kepala Kompartemen: Susilo
Redaktur:
Arief Indra Dwisetyadi

JawaPos.com
Direktur: Eddy Nugroho
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Dhimas Ginanjar
Satria Perdana

Jawa Pos Group Newsroom
General Manager:
Bambang Janu Isnoto

Jawa Pos Radar
Direktur Utama: Leak Kustiyo
Direktur: Marsudi Nurwahid P.
Wakil Direktur: Baehaqi, Desy Andriani, **Radar Malang:** Tauhid Wijaya
Radar Kediri: Kurniawan Muhammad, **Radar Tulungagung:** Aris Sudanang
Radar Madiun: Marsudi Nurwahid P., **Radar Bojonegoro:** Bachtiar Febrianto
Radar Tuban: Tulus Widodo, **Radar Mojokerto:** M. Nur Kholis **Radar Bromo:** Ahmad Suyuti,
Radar Jember: Choliq Baya, **Radar Banyuwangi:** Samsudin Adlawi, **Radar Madura:** Abdul Aziz,
Radar Solo: Resita Rika Ariyani, **Radar Semarang:** Baehaqi, **Radar Kudus:** Baehaqi
Radar Jogja: Ananto Priyatno, **Radar Bali:** Justin M. Herman **Radar Jombang:** M. Nur Kholis

Percetakan: PT Temprina Media Grafika
Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31, Wringinanom, Gresik
Telepon Redaksi: 031-8202240, **Fax:** 031-8285555
Telepon Iklan: 031-8202254, **Fax:** 031-8294573, **E-Mail:** iklan@jawapos.co.id
Telepon Pemasaran: 031-8202000, **Fax:** 031-8250009
Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan
Telepon: 021-53699500, **Fax:** 021-5349207 **Homepage:** http//digital.jawapos.co.id
E-Mail: editor@jawapos.co.id **Harga Langganan:** Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 150.000 **Jakarta:** Rp 140.000 **Luar Pulau:** Tambah ongkos kirim